

KORAN DIGITAL

radar.  
MEDIA

RADAR SAMARINDA

EDISI KAMIS  
24 AGT 2023

AKTUAL & TERPERCAYA

.COM



**DPRD SAMARINDA SAYANGKAN  
BACALEG PASANG ALGAKA  
SEMBARANGAN**

**MUDA  
DINAMIS  
AMANAH**



**ARIE  
WIBOWO**

**CALEG DPRD KOTA SAMARINDA**  
DAPIL 5 SAMARINDA UTARA - SUNGAI PINANG





## DPRD SAMARINDA SAYANGKAN BACALEG PASANG ALGAKA SEMBARANGAN

**SAMARINDA** - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Joni Sinatra Ginting mengaku banyak menerima aduan terkait pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (algaka) gambar atau spanduk Bakal Calon Legislatif (Bacaleg), dengan tidak mengindahkan aturan demi keindahan Kota.

"Saya sebagai anggota Komisi I sangat banyak menerima aduan terkait pemasangan algaka ini, karena mereka menaruh (algaka) tidak sesuai aturan," ujarnya.

Joni memperkirakan kemungkinan hal ini dilakukan oleh Bacaleg yang tidak mengetahui aturan pemasangan algaka. "Nah ini kemungkinan adalah Ca-

leg baru, seharusnya mereka mengetahui aturan Perwali soal pemasangan algaka tersebut," ujarnya.

Dia menjelaskan ada tempat-tempat yang boleh dipasang algaka dan ada pula tempat yang tidak boleh pemasangan algaka.

"Yang pertama jelas harus ada izin minimal dari Kesbangpol, karena ini masih Bacaleg harus izin di sana partainya. Terus tempat-tempat yang dibolehkan pasang di mana tanya sama pihak yang berwenang, jangan sembarangan memasang Algaka," tambahnya.

Dalam penertiban yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) beberapa hari yang lalu, banyak juga Bacaleg yang komplain atas pen-

cabutan Algakanya.

"Bahkan ada camat-camat yang lapor ke saya, mereka katanya sampai diancam-ancam. Kata saya cabut saja spanduknya dan pindahkan di tempat lain, biarkan mereka pasang sendiri, ini demi estetika kota. Kita punya aturan nggak boleh sembarangan," tegasnya.

Mendengar keluhan dari camat-camat tersebut, Joni sangat menyayangkan perlakuan Bacaleg tersebut, karena sebagai Bacaleg tidak memberikan contoh yang baik.

"Masa hal sepele seperti ini saja nggak bisa taat, bagaimana dengan aturan yang lebih tinggi pasti dilanggar juga sama Bacaleg yang mental seperti ini," keluhnya. **(han)**

MKP MEDIA KALTIM PROMOSINDO



RAMAIKAN  
& IKUTI  
EVENT  
NYA  
YUK

DAFTAR PAKAI  
KUPON  
DIGITAL  
GRATIS

ACARA PUNCAK  
HUT KE-3 MEDIA KALTIM :

27 AGUSTUS 2023

IKUTI JUGA  
SENAM SEHAT  
BERSAMA  
(XEROBIC QUEEN76)

# JALAN SEHAT



LAPANGAN EX. TEMINDUNG SAMARINDA  
MULAI PUKUL 06.00 WITA

Daftarkan diri gratis melalui link:

<https://registration.myevents.id/contests/1/registration>



# Paket **MAKSIMAL** Karyawan

(Makan Siang Hemat Lengkap Untuk Karyawan)

## Paket Ber2

Rp **90rb** nett  
/pax

## Paket Ber3

Rp **130rb** nett  
/pax



### Pilihan 7 Menu Khas Nusantara

- 1 Ikan Dori Saus Telur Asin
- 2 Ikan Dori Asam Manis
- 3 Ayam Geprek Cabe Hijau
- 4 Ayam Bakar Taliwang
- 5 Rendang Daging Padang
- 6 Ikan Nila Masak Tauco
- 7 Ikan Nila Goreng Colo-Colo

**FREE**

**1 pax comp.**  
Light Meal





# BAWASLU PPU: IMBAU MASYARAKAT AKTIF CERMATI DCS



HETIFAH AJAK GURU CIPTAKAN  
SATUAN PENDIDIKAN  
BEBAS KEKERASAN ANAK



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian saat memberikan pemahaman pada tenaga pendidik di PPU dalam workshop, Rabu (23/8/2023). (Robbi/MediaKaltimGroup)

## HETIFAH AJAK GURU CIPTAKAN SATUAN PENDIDIKAN BEBAS KEKERASAN ANAK

**PPU** - Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Hetifah Sjaifudian memberikan peningkatan pemahaman perlindungan anak di lingkungan pendidikan di Penajam Paser Utara (PPU). Bertujuan untuk memberikan jaminan dunia pendidikan di daerah sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN) terselenggara dengan baik dan aman. Kegiatan itu disampaikan melalui gelaran Workshop Pendidikan dengan tema "Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan".

Berkolaborasi dengan Ditjen PAUD Dikdasmen Kemendikbudristek RI menghadirkan ratusan guru di The Rich Hotel, Kelurahan Lawe-Lawe, Penajam, Rabu (23/8/2023).

Hetifah mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Mereka didorong mengisi gerakan pencegahan kekerasan terhadap anak di mana saja.

"Baik itu di rumah dan di mana pun anak berada serta meningkatkan kesadaran peran penting dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak," ujar dia.

Tantangan besar dalam dunia pendidikan saat ini, menurut

dia, adalah maraknya kasus kekerasan terhadap anak di satuan pendidikan. Dampak dari kekerasan salah satunya menghambat terwujudnya lingkungan belajar yang baik.

"Hak anak itu banyak, salah satunya hak keselamatan. Kita berkewajiban mengkampanyekan keselamatan anak di IKN baik itu dari kejahatan seksual, fisik maupun psikis," sebut Hetifah.

Lanjut dia, trauma dapat bertahan seumur hidup terhadap seorang anak. Maka dari itu satuan pendidikan perlu menciptakan lingkungan yang aman dan melindungi siswa-siswinya dari kekerasan.

"Setiap anak berhak mendapatkan pengasuhan yang layak dan dilindungi dari kekerasan, penganiayaan dan pengabaian. Intinya jadilah guru yang baik yang dapat menciptakan rasa aman dan nyaman kepada murid dalam menuntut ilmu di sekolah," beber Hetifah.

Lebih lanjut, setiap sekolah di PPU harusnya memiliki layanan psikologi bagi anak. Untuk memastikan ketika anak-anak mengalami sesuatu yang mengganggu kemana harus mengaduh.

Widyaprada Ahli Utama Di-

rektorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD Dikdasmen) Kemendikbudristek, Jumeri menambahkan peningkatan ini sangat dibutuhkan untuk PPU. Sebab, tolok ukur pemindahan IKN merupakan alasan yang memang harus disikapi dengan bijak dan tepat sasaran.

"Seperti yang dikatakan Ibu Hetifah, Kaltim khususnya PPU itu masa depan Indonesia. Semakin berkualitas dan berkembang kota ini, akan butuh sumber daya manusia yang hebat-hebat untuk negara ini," ungkapnya.

Salah satu langkah yang harus diambil ialah menciptakan dunia pendidikan yang aman dan nyaman. Aman untuk menyelenggarakan merdeka belajar, yang mengerti kemauan para peserta didik.

"Anak-anak dari PPU harus disiapkan, agar mereka siap. Kami siapkan generasi mudanya, kebhinekaannya baik, karakternya bagus, akhlakunya mulia dan bagus kompetensinya. Sekolah-sekolah yang aman harus diwujudkan, agar para anak-anak dapat bertumbuh kembang dengan sempurna," pungkas Jumeri. **(sbk)**



Ketua Bawaslu PPU, Mohammad Khazin saat ditemui di runag kerjanya. (Robbi/MediaKaltimGroup)

## BAWASLU PPU IMBAU MASYARAKAT AKTIF CERMATI DCS

**PPU** - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengimbau kepada masyarakat untuk aktif mencermati Daftar Calon Sementara (DCS) Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) Penajam Paser Utara (PPU). Partisipasi itu bertujuan untuk memastikan terwujudnya lembaga perwakilan rakyat yang berkualitas.

Seperti diketahui, KPU PPU mengumumkan DCS pada Sabtu (19/8/2023) dan berlangsung sampai Rabu 23 Agustus 2023. Pada masa pengumuman inilah masyarakat bisa memberikan tanggapan terhadap para calon sementara legislatif atas rekam jejak para kandidat yang akan berkompetisi pada Pileg 2024.

Pencermatan dapat dilakukan dengan mengakses DCS Bacaleg di laman resmi KPU PPU. Masyarakat dapat membuka link [kab-penajam.kpu.go.id](http://kab-penajam.kpu.go.id) dalam aplikasi peramban yang terdapat di ponsel atau komputer.

Ketua Bawaslu PPU Moham-

mad Khazin menyebutkan bahwa saat ini sedang memasuki tahapan menunggu tanggapan masyarakat terhadap DCS yang ditetapkan oleh KPU. Dalam masa tersebut, berpotensi ada calon yang melakukan pelanggaran administratif maupun pidana.

"Potensi pelanggaran pertama baik administratif maupun pidana. Itu yang perlu diantisipasi kami di Bawaslu, yang kedua potensi sengketa-sengketa," ungkapnya, Rabu (23/8/2023). Masa sengketa ini, sebutnya, saat tahapan penyusunan Daftar Caleg Tetap (DCT). Penyelesaian sengketa kata dia, ada dua yakni melalui mediasi dan sidang adjudikasi.

"Setelah penetapan DCT, potensi kerawanan yang diantisipasi yakni sengketa. Bisa saja hasil DCT disengketakan oleh partai politik tertentu, apabila ada calonnya yang tidak diloloskan nantinya," jelas Khazin.

Maka dari itu, Khazin menegaskan tahapan tanggapan mas-

yarakat ini merupakan momen yang paling penting publik mengambil peran sejak awal. Sebab, dalam hal ini tentu saja Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri.

"Tidak mungkin bahwa seluruh kewenangan, tugas dan tanggungjawabnya ada di Kami. Oleh karena itu, lapis kedua ini masyarakat dan yang ketiga adalah peserta pemilu, dalam artian partai politik dan orang-orangnya," terangnya.

Lebih lanjut, dalam hal pencegahan Bawaslu PPU dalam waktu dekat ini bakal berkoordinasi dengan berbagai pihak. Khususnya lembaga-lembaga pemerintahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat.

"Sebagai upaya preventif, akan dilakukan imbauan-imbauan melalui lembaga-lembaga atau kecamatan, kelurahan dan desa-desa. Karena memang peran masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu," tutup Khazin. **(sbk)**



**DIALOG BERSAMA KOMISI II DPR RI,**  
**RASID: TERIMA MASUKAN**  
**MASYARAKAT LOKAL**

**NELAYAN MULAI RASAKAN**  
**DAMPAK KEMARAU PANJANG**





Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid (tengah), saat bersama dengan Ketua Komisi II DPR RI, Dolly Kurnia (kiri). (Istimewa)

## DIALOG BERSAMA KOMISI II DPR RI, RASID HARAP MASUKAN MASYARAKAT LOKAL DITERIMA

**TENGGARONG** - Rombongan Komisi II DPR RI, yang dipimpin langsung oleh Dolly Kurnia, disambut langsung Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dan Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid, pada Selasa (22/8/2023) malam, di Hotel Platinum, Balikpapan.

Agenda berupa dialog ini, dilakukan pasca Komisi II DPR RI, melakukan kunjungan langsung ke Titik Nol IKN pada siang sebelumnya. Pada acara dialog itulah, menjadi kesempatan masyarakat Kaltim menyampaikan sejumlah pesan dan masukan.

Seperti dukungan dan saran bagaimana pelaksanaan IKN ini harus melibatkan masyarakat lokal di Kaltim. Dan harus menjaga adat budaya di Kaltim.

"Tadi malam juga hadir Pangeran Poeger dari Kesultanan Kutai yang menyampaikan masalah bagaimana peninggalan Kesultanan di Kukar harus diperhatikan, termasuk juga dengan Kesultanan yang ada di Kaltim," ungkap Rasid.

Selain itu, Rasid pun sempat menyampaikan terkait status beberapa kecamatan yang masuk menjadi bagian dari IKN itu sendiri. Terlebih sudah mendekati waktu pemilu yang jatuh pada tahun 2024 mendatang. Status pemilih mereka nantinya pada 2024, apakah masuk wilayah pemilihan IKN atau tetap masuk wilayah Kukar.

Tak hanya itu, pembangunan IKN pun turut dibahas dalam pertemuan bersama wakil Senayan tersebut. Bagaimana kabupaten dan kota yang menjadi mitra maupun penyangga bisa ikut terlibat dan turut merasakan pembangunan. Dengan kata lain, kabupaten dan kota mitra dan penyangga memiliki rasa tanggung jawab dalam mempercepat pembangunan IKN.

"Kita tidak tahu karena pembahasannya di Jakarta, mudah-mudahan apa yang disampaikan masyarakat kita bisa diakomodir," tutup Rasid. (adv)



Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid. (Istimewa)

## FASILITASI KEGEMARAN MASYARAKAT, KETUA DPRD KUKAR DUKUNG LOMBA LAYANG-LAYANG DI MALUHU

**TENGGARONG** - Permainan tradisional layang-layang kini kembali digandrungi masyarakat, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Tak terkecuali di Kutai Kartanegara (Kukar). Layang-layang warna-warni mewarnai langit, seperti yang terjadi di Kelurahan Maluhu.

Ini pun memikat perhatian Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid, hingga menjadikannya lomba. "Untuk meramaikan Dirgahayu RI, kebetulan sekarang ini momennya pas (musim layang-layang)," ujar Rasid, Rabu (23/8/2023).

Tidak main-main, lomba yang dipusatkan di Jalan Selimpat, Kelurahan Melayu, ini menyiapkan hadiah uang tunai hingga jutaan rupiah. Dilaksanakan selama dua hari, yakni 26-27 Agustus 2023.

Dukungan yang ia berikan ini, dikatakan oleh Rasid, sebagai bentuk harapan

agar permainan masa kecilnya ini, tidak termakan oleh waktu di tengah gempuran anak-anak hingga remaja yang lebih menyukai gadget.

"Saya hanya men-support, warga Maluhu yang selenggarakan. Jadi lombanya itu adu tegangan tali tiap peserta saat menerbangkannya ke langit," lanjutnya.

Memang adu layang-layang jadi permainan baru yang kini digandrungi. Ini pun dianggap jadi wadah yang tepat, sehingga para anak-anak tidak bermain ditempat yang tidak seharusnya, di jalan raya salah satunya. Selain membahayakan pemainnya, juga pengguna jalan yang sering terlilit sisa-sisa tali layang-layang.

"Anak-anak, orang tua main layang-layang disitu. Menjadi hiburan masyarakat kita juga. Bahkan beberapa kali kami terputar tidak bisa lewat karena penuh sekali. Ini menjadi tempat wisata yang baru," tutupnya. (adv)



Suasana sosialisasi program Jaksa Jaga Desa, di Pendopo Odah Etam. (Istimewa)

## PERDANA DI KALTIM, KEJAGUNG RI GELAR SOSIALISASI PROGRAM JAKSA JAGA DESA DI KUKAR

**TENGGARONG** - Pusat Penerangan Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia (RI), menyelenggarakan Sosialisasi Program Jaksa Jaga Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Kegiatan ini dilaksanakan di Pendopo Odah Etam, Rabu (23/8/23).

Turut dihadiri Bupati Kukar, Edi Damansyah, bersama Tim Penerangan Kejagung RI, Martha Parulina. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Ariyanto, Kajari Kukar, Tommy Kristanto. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh kepala desa se-Kukar. Bersama dengan perangkat desa dan pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sebagai peserta.

Saat ditemui pasca kegiatan ini, Edi Damansyah, mengatakan sosialisasi program Jaksa Jaga Desa ini merupakan bagian dari penguatan terhadap kepala desa, prangkatnya, dan BPD beserta anggota.

Dimana peran jaksa ini menjadi pendamping. Mengawal jangan sampai nanti di dalam tugas-tugas kepala desa itu ada penyalahgunaan kewenangan seperti itu fokusnya. "Harapan saya, dengan sosialisasi yang

ada ini para kepala desa, anggota BPD serta jajarannya. Bisa memahami lagi lebih utuh yang berkaitan dengan peraturan ketentuan yang menjadi pedoman kita dalam melaksanakan tugas di penyelenggaraan pemerintahan desa," kata Edi.

Dalam kesempatan ini, Martha Parulina, juga turut menjelaskan tujuan dari sosialisasi Program Jaga Desa ini adalah untuk lebih mendekatkan masyarakat kepada kejaksaan. Sehingga fungsi kejaksaan untuk memberikan pendidikan dan sosialisasi terkait hukum di desa terlaksana dengan baik.

"Intinya tidak ada lagi perangkat desa yang korupsi, tidak ada lagi kepala desa yang ketidaktahuan tentang hukum di desa. Kemudian masyarakat desa terakomodir di dalam pelaksanaan kejaksaan sebagai aparat penegak hukum," jelasnya.

"Kegiatan sosialisasi ini kalau di Kalimantan Timur baru pertama kali dilaksanakan di Kukar. Dipilihnya Kukar, karena ada beberapa desa yang bermasalah terkait dengan penggunaan dana desa." pungkasnya. **(tab)**



Kuasa Hukum dari Eko Wulandanu, Ali Fahrudy. (Istimewa)

## MASALAH DUALISME KEPENGURUSAN DPC PKB KUKAR, BERAKHIR DIPERSIDANGAN

**TENGGARONG** - Konflik yang melanda Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kesatuan Bangsa (PKB) Kutai Kartanegara (Kukar), kian memanas. Kini permasalahan dualisme kepengurusan DPC PKB Kukar sampai pada proses persidangan.

Setelah DPC PKB Kukar, versi Haidir, melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Tenggarong. Atas dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yakni memproses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kukar. Dari Partai PKB yang dianggap masih terjadi polemik internal.

Dimana gugatan ini turut menyeret Eko Wulandanu, yang merupakan pimpinan DPC PKB Kukar dari versi lainnya. DPRD Kukar, KPU Kukar, dan Bawaslu Kukar dan menjalankan sidang perdana pada Rabu (23/8/2023), di PN Tenggarong.

Ali Fahrudy, selaku kuasa hukum dari Eko Wulandanu, yang turut hadir dalam sidang perdana ini mengatakan, pihaknya akan tetap menghargai dan mengikuti proses hukum yang telah memasuki persidangan perdana ini. "Yang pasti terkait apa yang mereka gugat terhadap klien

kami, kami tetap menanggapi dengan bijak dan santun," kata Ali.

Terlebih ia merasa, apa yang digugat pada kliennya ini tidaklah benar. Dimana Ali mengatakan bahwa Eko Wulandanu merupakan ketua sah dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kukar.

"Dimana ada pengakuan seseorang yang mengaku sebagai Plt ketua DPC PKB Kukar dan dibaca oleh pimpinan pusat justru malah pimpinan pusat sendiri kaget," tambah Ali.

Ia menegaskan bahwa pihaknya akan tetap hadir dan menanggapi gugatan dari penggugat. Dimana pihaknya menyatakan siap untuk menjawab gugatan yang dilayangkan pada kliennya. Pihaknya menargetkan persoalan ini akan selesai dalam waktu cepat. Seperti yang disampaikan hakim, yakni 60 hari sejak didaftarkan dan dipastikan. Ali meyakini kasus ini akan diputus sebelum tanggal 10 Oktober ini.

"Sidang berikutnya itu Minggu depan hari Rabu tanggal 30 agustus 2023. Kita akan jawab gugatan itu di persidangan berikutnya," terangnya. **(tab)**



Kepala DKP Kukar, Muslik. (Ady/Radar Kukar)

## NELAYAN MULAI RASAKAN DAMPAK KEMARAU PANJANG

**TENGGARONG** - Kemarau panjang yang melanda Kutai Kartanegara (Kukar) sejak tiga bulan kebelakang, membawa berbagai dampak pada masyarakat. Salah satunya yang terdampak secara langsung adalah nelayan. Lantaran beberapa sungai mengalami penurunan debit air bahkan mengering.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kukar, Muslik, mengungkapkan bahwa sebenarnya dampak kemarau itu sudah terpola. Sehingga saat air dalam atau air surut, menggunakan alatnya tangkap berbeda.

"Jadi kalau air surut panen melimpah, namun harga ikan turun biasanya. Untuk itu kita mendorong agar nelayan bisa memanfaatkan hasil ikan ini untuk olahan seperti ikan asin, ikan salai," ucap Muslik, Rabu (23/8/2023).

Dikatakan Muslik, kekeringan ini juga

terkadang membawa manfaat tersendiri bagi para nelayan. Dimana terkadang hasil tangkapan para nelayan mengalami peningkatan. Ia menambahkan, selain melimpahnya ikan akibat surutnya air sungai, kemarau juga memberikan dampak kepada nelayan budidaya. Dimana keramba-keramba ikan yang ada dan pastinya mereka mengurangi produksi.

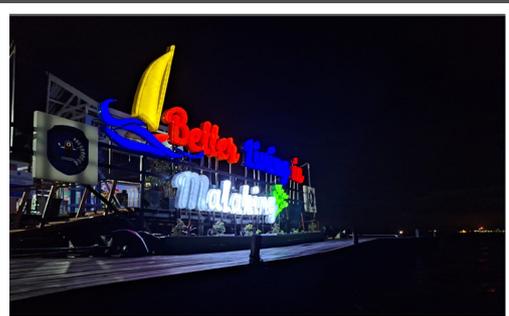
Karena sebagian kerambanya tidak bisa digunakan. Kalaupun terlalu ke tengah takutnya mengganggu jalur lalu lintas kapal. Karena budidaya ikan tergantung pada debit air, sehingga berpengaruh pada keberlangsungan budidaya itu sendiri.

"Kita sudah melakukan rembuk beberapa kali dengan para nelayan dan pembudidaya bagaimana terkait kondisi saat ini, sehingga bisa mengantisipasi masalah tersebut." pungkasnya. **(tab)**



# MACET SAAT KAPAL SANDAR DI PELABUHAN LOKTUAN DIKELUHKAN ANGGOTA DEWAN

**BACA HALAMAN A2**



## Yuk Dukung Malahing Jadi Desa Wisata Favorit ADWI 2023! Begini Caranya

**BACA HALAMAN A4**



## DPRD KOTA BONTANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



IST

Pelabuhan Loktuan saat kapal sandar.

# Macet Saat Kapal Sandar di Pelabuhan Loktuan Dikeluhkan Anggota Dewan

BONTANG – Mewakili warga Selambai, Kelurahan Loktuan dan sekitarnya, Anggota Komisi III DPRD Bontang, Faisal mengeluhkan kondisi macet di Pelabuhan Loktuan saat kapal bersandar kepada Wali Kota Bontang.

Hal itu disampaikan saat Rapat Pengesahan Perubahan-APBD Bontang Tahun 2023 melalui rapat paripurna ke-16 masa sidang 3, Jumat (18/8/2023) di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang.

Diungkapkan Politisi dari Partai Nasdem ini, setiap ada kapal bersandar di Pelabuhan Loktuan, maka kondisi macet

tidak terelakkan. Lantaran lalu lintas penjemput penumpang maupun penumpang kapal itu sendiri yang berlalu lalang di pelabuhan menimbulkan kemacetan.

Aktivitas kemacetan di jalanan menuju pelabuhan dikatakannya luar biasa macet. Sehingga membuat warga sekitar pelabuhan terganggu.

"Setiap ada kapal kami merasa terganggu. Warga sekitar kesulitan keluar masuk wilayahnya. Bahkan toko-toko di pinggir jalan pun terimbas," keluh Faisal.

Wali Kota Bontang menanggapi keluhan tersebut dengan men-

gatakan, pihaknya akan berusaha melakukan pembebasan lahan di sekitar pelabuhan. Hal itu menjadi solusi kemacetan yang terjadi saat kapal bersandar.

"Parkiran pelabuhan di perubahan ini kami akan lakukan appraisal pembebasan lahan. Ada beberapa yang akan kita appraisal untuk pembebasan lahan di pelabuhan. Lainnya seperti perbaikan folder, sekolah, pemukiman, dsb. Mudah-mudahan tahun depan bisa dibebaskan. Kalau sudah dibebaskan semoga parkirannya semakin bagus," jelas Basri. (adv/al)



Ilustrasi kampung pesisir Bontang.

## Pendataan Warga Miskin Pesisir Tak Maksimal, Pemkot Terkendala Kewenangan

BONTANG – Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang, Raking menyoroti pendataan warga miskin yang dirasa kurang maksimal. Khususnya pendataan warga miskin yang berada di kawasan pesisir Bontang.

Hal itu diungkapkannya saat Penge-sahan Perubahan-APBD Bontang Tahun 2023 melalui rapat paripurna ke-16 masa sidang 3, Jumat (18/8/2023) di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang.

Dijelaskan Raking, mengapa pendataan di kawasan pesisir dirasa kurang, lantaran masih banyaknya warga pesisir

yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah.

“Pendataan warga di kampung-kampung pesisir tidak maksimal. Bantuan-bantuan pemerintah yang seharusnya bermanfaat buat masyarakat miskin belum terlalu dirasakan oleh warga pesisir,” ungkapnya.

Menurut Wali Kota Bontang menanggapi sorotan tersebut, bahwa masalah kemiskinan selalu jadi perhatian bagi Pemkot Bontang. Namun begitu, Pemkot menemui kendala terkait pendataan warga miskin ini. Lantaran data yang dipakai Pemkot merupakan data dari

Kementerian Sosial RI.

“Masalahnya kita gak punya kewenangan untuk pendataan secara objektif dan riil di lapangan,” ujarnya.

Ia menambahkan, bahwa kriteria kemiskinan ini juga terkadang menjadi permasalahan sendiri. Karena menurutnya masih banyak orang yang sebenarnya mampu namun mengaku miskin.

“Coba lihat di kantor pos kalau ada yang antri bantuan pakai hape, pakai motor, karena ingin dapatkan bantuan-bantuan dari Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja dan lain sebagainya,” ucap Basri. (adv/al)



YUSVA ALAM

Desa Wisata Malahing di malam hari.

## Yuk Dukung Malahing Jadi Desa Wisata Favorit ADWI 2023! Begini Caranya

**BONTANG** – Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Bontang meminta dukungan seluruh masyarakat Bontang agar Desa Wisata Malahing dapat menjadi juara favorit dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) Tahun 2023.

Diketahui, Malahing telah menjadi salah satu nominasi desa wisata dalam ADWI Tahun 2023 di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Ke-

menparekraf) RI. Kampung di atas laut ini masuk nominasi di antara 75 desa wisata seluruh Indonesia.

Mengutip dari Instagram Dispopar Bontang, dukungan kepada Desa Malahing berupa vote video Malahing dengan cara like, comment, dan subscribe di channel youtube Kemenparekraf RI dengan klik link di bawah ini:

[https://www.youtube.com/watch?v=vzOF9ja13nY&ab\\_chan-](https://www.youtube.com/watch?v=vzOF9ja13nY&ab_chan-)

nel=Kemenparekraf

Kadispopar, Ahmad Aznem mengatakan, batas waktu memberikan vote video Malahing dimulai 21 – 25 Agustus 2023. Karenanya dia memohon dukungan seluruh warga Bontang untuk memberikan dukungan.

"Dengan dukungan kita semua, semoga Desa Wisata Malahing bisa mendapatkan Anugerah Desa Wisata Indonesia terfavorit," harapnya. (adv/al)

# Pengunjung Keluhkan Gedung MTQ Kotor dan Kurang Penerangan, Ini Tanggapan PUPRK

**BONTANG** – Seorang pengunjung mengeluhkan fasilitas penerangan di Gedung MTQ yang berada di dalam Stadion Bessai Berinta Lang-lang, Jalan KS. Tubun, Kelurahan Api-Api.

Keluhan tersebut diposting dalam bentuk video di sosial media Facebook, Selasa (22/8/23).

Dalam postingannya, pengunjung tersebut berencana akan melaksanakan Sholat Magrib, namun saat ingin mengambil wudhu dan menuju toilet, mereka harus melewati ruangan gelap sehingga suasana terkesan mencekam.

Diketahui, pemilik akun Facebook tersebut adalah Azna Tamrin. Ia menunjukkan kondisi Gedung MTQ yang tidak hanya gelap, tetapi juga toilet dan tempat wudhu kotor.

"Minimal lampu sama airnya nyalahlah kasian," keluhnya dalam video itu.

Ia memposting 3 video berbeda yang menggambarkan kondisi mushola dalam video terlihat gelap dan tidak ada kipas angin, sajadah pun terlihat kurang layak.

"Jangankan kipas angin buat adem-adem gituloh," lanjutnya saat memasuki area mushola.

Azna memposting video tersebut dengan caption "Sedikit penampakan mushola di Lang-Lang, ini kalo aku gak bareng paksu sholatnya mungkin aku dah ngibrit kabur cari masjid sekalian pulang aja wes, airpun ga ngalir, syukur banget uda wudhu dari rumah. Nggak kebayang yang mau buang air masuk toilet sini gimana," tulisnya.

Menanggapi kondisi tersebut, Sek-



Tangkapan video situasi di dalam Gedung MTQ Lang-Lang.

retaris Dinas PUPRK Bontang, Iskandar menjelaskan, bahwa gedung tersebut merupakan salah satu aset Dinas PUPRK yang rencananya baru akan diberikan kepada dinas terkait.

"Statusnya masih aset PUPRK dan baru mau diserahkan ke Dispopar," jelasnya saat dihubungi redaksi, Rabu

(23/8/23)

Sebelumnya, gedung tersebut sempat diisi oleh Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra), namun sekarang sudah tidak ada yang berkantor di sana. Hal tersebut membuat kebersihan Gedung MTQ tidak terurus. Pemeliharaannya juga masih diajukan. (adv/sya)



SYAKURAH

Kunjungan lapangan Wali Kota Bontang, Basri Rase ke SDN 007 BU.

## Keluhan Sekolah Diterima, Pemkot Alokasikan Anggaran Relokasi SDN 007 Guntung

BONTANG – Pemkot Bontang bakal menyiapkan anggaran untuk relokasi bangunan SDN 007 di Kelurahan Guntung. Hal itu diungkapkan Wali Kota Bontang, Basri Rase saat meninjau langsung sarana dan prasarana (sapas) SDN 007 Guntung, Rabu (23/8/23)

Dalam kunjungan tersebut, pihak sekolah berterima kasih kepada Pemkot Bontang yang telah merespon proposal yang diajukan. Respon tersebut ditunjukkan dengan kehadiran Sekda dan Wali Kota Bontang melihat langsung kondisi sekolah lokasi kemarin dan hari ini.

Kepala sekolah SDN 007 Bontang Utara, Nurmiani menjelaskan, beberapa fasilitas utama yang kurang yakni toilet. SDN 007 BU memiliki total 589 peserta didik dan 31 tenaga pengajar, namun toilet yang tersedia hanya 6 saja.

"Untuk idealnya, setidaknya kita

memiliki 17 toilet untuk peserta didik sebanyak itu," terangnya.

Terdapat juga toilet yang ada septi tanknya, namun aliran limbahnya tidak ada, sehingga ketika merembes biasanya ada ular. Pembuatan aliran limbah juga bermasalah karena sudah serba mepet dengan pemukiman.

Selain itu, aroma amoniak juga kerap tercium selama proses mengajar, sehingga menyebabkan beberapa siswa mengeluh tidak bisa bernafas dan lain sebagainya.

Ruang kelas yang juga terbatas membuat pengajaran dijadikan 2 shif, yakni pagi dan siang.

"Karena lapangan kecil, biasanya siswa yang upacara hanya kelas 4,5, dan 6. Itupun mereka tidak mengenal lencang depan, karena kalau mereka lencang depan tidak akan cukup," tambahnya.

Wilayah tersebut juga dapat tergenang air jika hujan lebih dari 10 menit, bahkan saat dilihat di lokasi sudah terdapat air menggenang karena diguyur hujan pada pagi hari.

Wali Kota Bontang, Basri Rase yang melihat langsung kondisi sapras sekolah tersebut menyatakan, kurang layak fasilitas di sana sehingga akan ditindaklanjuti dengan mengalokasikan anggaran terkait lokasi, serta dana pembangunan sekolah dengan dinas pendidikan.

"Seharusnya SD ini bisa menjadi sekolah terpadu, sehat dan hijau, termasuk WC, kantin, perpustakaan, dan UKS. Sekali membangun harus yang berjangka panjang, karena kita menyikapi masyarakat yang tentu makin banyak," tegasnya.

Pewarta: Syakurah  
Editor: Yusva Alam



# PANITIA PILKAKAM SERENTAK **HARUS SELEKTIF**



**ISPO JADI SYARAT JUAL TBS  
PADA 2025 MENDATANG**



Kepala DPMK Berau, Tenteram Rahayu.

## PANITIA PILKAKAM SERENTAK DI BERAU DIMINTA SELEKTIF

**TANJUNG REDEB** - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, Tenteram Rahayu mengingatkan panitia pemilihan kepala kampung (Pilkakam) serentak untuk selektif memeriksa berkas bakal calon kepala kampung.

Pihaknya juga memastikan semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) di setiap kampung sudah terbentuk. Yang mana pada Oktober mendatang ada 53 kampung yang melakukan pilkacam serentak.

"Kebanyakan di setiap kampung ada satu TPS, namun ada juga yang lebih dari satu TPS, tergantung jumlah pemilihnya," ungkapnya, Rabu (23/8/2023).

Lanjutnya, dari proses persiapan yang pihaknya lakukan, salah satu yang paling penting adalah

peran dari panitia pilkacam serentak. Pasalnya, panitia harus lebih jeli dan teliti serta selektif dalam pemeriksaan berkas bakal calon kepala kampung.

"Pemberkasannya harus lebih teliti dan cermat diperiksa, pasalnya untuk menghindari masalah yang tidak diinginkan di kemudian hari," tegasnya.

Tenteram berpesan kepada panitia Pilkacam serentak untuk memperhatikan, jika peserta bakal calon kepala kampung hanya satu calon, perlu diperpanjang waktu pendaftarannya. Namun, jika calon yang mendaftar lebih dari lima, akan ada ujian tertulis.

"Kalau hanya satu calon kita perpanjang masa pendaftaran, namun lebih dari lima calon kita akan melaksanakan ujian tertulis," tegasnya.

Pihaknya juga telah melakukan rapat bersama pihak TNI/Polri untuk membahas tentang persiapan keamanan pada saat proses pemungutan suara dalam pelaksanaan Pilkacam Oktober mendatang.

"Untuk menjaga kondusifitas, kami telah melakukan rapat bersama TNI/Polri," katanya.

Tenteram berharap, 53 kampung yang melaksanakan Pilkacam serentak bisa berjalan lancar hingga pelaksanaan Pilkacam serentak berjalan hingga selesai.

"Semoga persiapan kita matang dan tidak terlalu banyak kendala yang dihadapi. Tentunya kita berharap Pilkacam ini bisa sukses yang melahirkan kepala kampung yang bisa memajukan kampung dan mensejahterakan masyarakatnya," harapnya. **(mnz/dez)**



Petani sawit mandiri didorong memiliki STDB untuk bisa mendapat bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat.

## ISPO JADI SYARAT JUAL TBS PADA 2025 MENDATANG

**TANJUNG REDEB** - Dinas Perkebunan (Disbun) Berau mendorong para petani sawit mandiri di Kabupaten Berau memperoleh Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) untuk mendapatkan sertifikat Indonesian Palm Oil System (ISPO). Pasalnya pada 2025 mendatang, petani wajib memiliki ISPO agar dapat menjual Tandan Buah Segar (TBS).

Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Berau, Lita Handini menyebut, sejauh ini baru ada 129 petani sawit mandiri yang memiliki STDB. Targetnya, tahun ini pihaknya akan menerbitkan 500 STDB. Dalam kepengurusan itu pihaknya dibantu oleh berbagai NGO. Untuk mendampingi dan mendorong petani memiliki STDB.

"Karena masih banyak petani yang belum mau mengurus STDB," katanya, belum lama ini.

Pada 2025 mendatang pemerintah mewajibkan semua petani sawit harus memiliki sertifikat ISPO. Jika tidak, mereka tidak bisa menjual TBS. Makanya, Disbun Berau gencar untuk mendorong semua petani memiliki STDB.

"STDB menjadi persyaratan utama untuk mendapat ISPO. Di Berau sendiri belum ada yang memiliki ISPO tapi kalau perusahaan semua sudah punya," tuturnya.

Kendalanya, kata Lita, banyak petani mandiri yang bermasalah dengan lahannya. Seperti, tidak memiliki surat kepemilikan lengkap dan ada beberapa yang lahannya termasuk dalam kawasan hutan. Ada juga yang sudah memiliki tanah tapi kepemilikan tanahnya belum diubah menjadi miliknya.

"Sehingga kami tidak bisa menerbitkan STDB. Tapi kami mencoba berkoordinasi dengan provinsi adakah terborosan yang bisa dicapai. Misal pakai surat keterangan kampung atau bagaimana," jelasnya.

Selain itu, yang menjadi kendala yakni hanya ada dua tenaga yang melakukan pemetaan. Sebab untuk memberikan STDB harus dipetakan titik koordinatnya agar lebih jelas berapa luas lahan sawit yang dimiliki.

"Tenaga kami hanya 2 orang saja untuk meneliti semua persyaratan. Makanya kami butuh

bantuan pihak ketiga untuk membantu proses penerbitan STDB itu," paparnya.

Lanjutnya, STDB juga sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan dari provinsi dan pusat. Memang diakuinya persyaratannya lebih banyak. Yang saat ini dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Alokasinya khusus untuk petani sawit mandiri yang harus memiliki kelompok dan STDB. Petani yang sudah punya STDB itulah yang diprioritaskan untuk dapat bantuan dari BPDPKS," ungkapnya.

Memang saat ini perkebunan masih menjadi prioritas pengembangan, karena menjadi salah satu penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar di Berau. Yang mana utamanya yakni komoditas sawit. Tapi pemerintah daerah menilai sawit sudah mampu mandiri. Makanya, Pemkab Berau tidak lagi memberikan bantuan pengembangan sawit.

"Sampai saat ini penerbitan PDRB masih berproses, mudah-mudahan target itu bisa tercapai," harapnya. (mnz/dez)



Ilustrasi gangguan jaringan listrik

## LISTRIK SERING PADAM DI BERAU, PLN SEBUT BANYAK GANGGUAN JARINGAN

**TANJUNG REDEB** - Pemadaman listrik kembali terjadi selama beberapa hari terakhir. Hal itu pun membuat masyarakat kesal.

Manager Unit Layanan Pelanggan (ULP) PLN Berau, Akhlis menuturkan, pemadaman listrik yang terjadi diakibatkan adanya gangguan sistem.

"Tetapi saat ini petugas di lapangan terus melakukan pemantauan terhadap jaringan-jaringan listrik yang ada," katanya, Rabu (23/8/2023).

Dia menerangkan, gangguan jaringan saat ini ditemukan di jalur arah PLTU Teluk hingga Express PLTD Sambaliung. "Namun gangguan tersebut sudah berhasil diatasi tim di lapangan," ujarnya.

Selain itu, pemadaman listrik juga terjadi

akibat adanya proses perbaikan tiang milik PLN. "Tetapi semoga besok tidak ada lagi pemadaman listrik yang terjadi," imbuhnya.

Sementara, salah seorang masyarakat, Liana mengaku kesal dengan pemadaman listrik yang terjadi. Sebab, dirinya mengaku sangat membutuhkan untuk pekerjaannya.

"Kalau matinya dari pagi terus, kita sulit untuk melakukan aktivitas. Semoga kedepan tidak ada lagi pemadaman listrik," ujarnya.

Ia menyebut, akibat listrik padam itu jaringan internet juga terganggu. Pasalnya, tower provider yang ada turut padam. "Saya harap ada solusi, karena setiap pemadaman selama 4 jam kita tidak tahu mau berbuat apa," tandasnya. **(dez)**



# **RICUH,** **PROSES CONSTATERING** **DI JALAN MERAH DELIMA**



**TAUFIK SEBUT PAJAK THM**  
**DIDUGA ALAMI KEBOCORAN**



Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Taufik Qul Rahman

## TAUFIK SEBUT PAJAK THM DIDUGA ALAMI KEBOCORAN

**BALIKPAPAN** - Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak tempat hiburan malam (THM) di Kota Balikpapan diduga banyak mengalami kebocoran. Hal ini disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Taufik Qul Rahman. Bahwa beberapa tempat hiburan ditemukan banyak pendomplengan pajak daerah.

"Berapa waktu yang lalu kami dari Komisi II diajak oleh Bapemperda ditemukan adanya tempat-tempat hiburan malam itu yang melakukan pendomplengan pajak. Banyak sekali permainannya, terutama tempat hiburan buka dulu baru izinnya dijalankan," ujarnya Rabu (23/8/2023).

Lebih lanjut Taufik menjelaskan, berdasarkan hasil sidak terdapat beberapa temuan seperti Tapping Box atau alat perekam dan monitoring pajak yang sudah disediakan oleh Dispenda ditemukan tidak aktif. Hal ini juga sempat ditanyakan kepada kasir THM, namun ketika dikonfirmasi kepada pihak pengelola itu tidak bisa menjawab.

"Padahal jelas ada buktinya, temuan

pembayaran di kasir. Jadi berapa kerugian pendapatan daerah dalam sehari?," jelasnya.

Dengan adanya kejadian ini, Taufik menduga ada permainan oknum Dispenda di lapangan atau juga mungkin Dispenda kekurangan tenaga untuk pengawasan di lapangan. Dengan kondisi ini, bisa dihitung berapa kerugian daerah yang diterima oleh Kota Balikpapan dari kebocoran PAD dari sektor pajak THM.

"Itu kemana pajaknya selama ini. Ini tidak pernah ditindak tegas, ataupun dilakukan penutupan terhadap THM. Ini ada apa dengan pemerintah kota?," tegasnya.

Dan saat ini juga banyak dari pengusaha tempat hiburan malam yang mengajukan keberatan dengan besaran pajak sebesar 60 persen yang diterapkan oleh pemerintah Kota Balikpapan. Namun yang menjadi persoalan adalah banyak pengusaha dari tempat hiburan yang kemudian tidak jujur dalam perhitungan penyeteroran pajaknya kepada daerah. **(ADV/DPRDBalikpapan/Bom)**



Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono sebut pengerjaan proyek pembangunan sekolah terpadu di Perumahan Balikpapan Regency, Balikpapan Selatan tidak akan sesuai target.

## PROGRES PEMBANGUNAN SEKOLAH TERPADU DI BALIKPAPAN REGENCY TAK SESUAI TARGET

**BALIKPAPAN** - Progres pengerjaan proyek pembangunan sekolah terpadu di Perumahan Balikpapan Regency, Balikpapan Selatan tidak akan sesuai target. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono usai melihat langsung progres di lapangan proyek pembangunan SMP Terpadu Balikpapan tersebut.

"Berdasarkan hasil kunjungan ke lapangan, pengerjaan proyek sekolah tersebut dinilai tidak sesuai dengan pencapaian pekerjaan yang ada di lapangan," ujarnya Rabu (23/8/2023).

Budiono menjelaskan, bahwa apa yang dipaparkan oleh PT Sarjis selaku kontraktor pelaksana, yang menyatakan bahwa progres pekerjaan di lapangan sudah mencapai 38 persen lebih tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

"Berdasarkan masukan yang disampaikan konsultan bahwa pembangunan 38 sekian persen tersebut, ternyata tidak sesuai di lapangan. Konsultan juga menyampaikan bahwa angkanya tidak seting-

gi itu dan konsultan juga sudah memberikan langkah-langkah peringatan kepada PT Sarjis yang tidak mencapai target yang ditentukan," jelasnya.

Budiono juga menambahkan, setelah bertemu dengan para pekerja proyek yang ada di sana bahwa pekerja juga tidak diberikan upah selayaknya.

"Sehingga kami lihat mereka para pekerja hanya duduk-duduk saja. Kata para pekerja mereka menunggu material. Dan ini kendala lagi, ternyata pemborong atau PT Sarjis ini juga tidak mempunyai dana yang kuat sehingga material terkendala," tambah Budiono.

Selanjutnya, konsultan juga sudah memberikan rekomendasi dengan sisa waktu 4 bulan hingga Desember 2023 mendatang.

"Nyaris pola kerja begitu kemudian pendanaanya tidak kuat. Saya tidak yakin itu akan selesai. Dan rekomendasi konsultan di PT Sarjis segera dilakukan evaluasi dan pemutusan kontrak kerja," tutupnya. **(ADV/DPRDBalikpapan/Bom)**



Proses constatering di Jalan Merah Delima RT 37 Kelurahan Sepinggan Baru, Balikpapan Selatan diwarnai aksi saling dorong antara petugas dan pemilik aset.

## RICUH, PROSES CONSTATERING DI JALAN MERAH DELIMA

**BALIKPAPAN** - Aksi saling dorong antara polisi dan warga terjadi di Jalan Merah Delima RT 37 Kelurahan Sepinggan Baru, Balikpapan Selatan pada Rabu (23/8/2023).

Aksi ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan proses constatering atau pencocokan objek sengketa dengan putusan atau penetapan atau perintah pengadilan terhadap aset berupa rumah dua lantai dan ruko.

Pemilik aset bersama kerabat dan warga setempat bertahan di jalan masuk rumah hingga akhirnya petugas berseragam lengkap dengan tameng dan tongkat mendorong paksa warga. Aksi saling dorong pun tak terhindarkan, petugas polisi harus memaksa warga untuk mundur.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mustika Bangsa yang mendampingi pemilik objek rumah, Wisnudin mengatakan, pengawalan pembacaan constatering yang dilakukan terlalu berlebihan. Belum lagi dengan ratusan personel yang dikerahkan ke rumah pemilik aset hingga sampai menurunkan anjing K9.

"Kami anggap ini berlebihan dan tidak sesuai dengan prosedur hukum," ujarnya usai pembacaan constatering. Wisnudin menjelaskan, semestinya constatering dilakukan

setelah adanya penetapan dari pengadilan ketika lelang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Setelah melalui proses lelang, kemudian dilakukan pengosongan dalam objek aset yang disengketakan.

"Harusnya dilakukan satu atau dua tahun lalu," jelasnya. Sementara itu pemilik rumah, Surianti menambahkan, pihaknya memang memiliki hutang di salah satu Bank BUMN di Balikpapan. Pinjaman itu dilakukan pada tahun 2019 lalu, mulanya cicilan yang diajukan oleh Surianti untuk tambahan modal usaha dengan menjaminkan aset rumahnya itu berjalan lancar.

Namun saat Covid-19 melanda, Surianti pun mulai kebingungan untuk melakukan pembayaran. Ia sempat mengajukan keringanan ke pihak bank karena kondisi usaha yang dibangunnya saat itu sepi, belum lagi kebijakan pembatasan yang dilakukan secara merata saat itu membuat bisnisnya lesu.

"Saya meminta keringanan beberapa kali bahkan bersurat secara resmi tapi tidak ditanggapi oleh pihak bank, saya bersurat ada 3 - 4 kali. Saya datang ke bank 3 kali, tapi tidak ada jalan saya dikasih," ujar Surianti. Di tengah kondisi ekonomi yang

sulit dengan sepi usaha yang dibangun karena wabah Covid-19 saat itu, Surianti makin dibuat bingung dengan kedatangan petugas lelang ke rumahnya, tepatnya pada 10 Mei 2023 lalu. Surianti pun terkejut dengan surat peringatan yang ia terima sebanyak 3 kali. Padahal sebelumnya Surianti tak pernah menerima SP apa lagi menandatangani.

Di dalam surat itu, dua aset berupa rumah dan ruko miliknya itu dijual dengan total senilai Rp 1,2 miliar. Ditambah lagi Surianti harus menyisakan utang yang harus dibayar senilai Rp 509 juta. "Yang saya sesalkan oknum bank ini kenapa dijual, sedangkan saya mau bayar utang saya," jelasnya.

Ditambahkan Wisnudin, bahwa proses constatering yang dilakukan hari ini terkesan dipaksakan. Ia akan melanjutkan proses hukum yang telah dilayangkan ke Polda Kaltim terkait dugaan pemalsuan tanda tangan oleh oknum Bank BUMN di Balikpapan.

Selain itu, pihaknya juga tengah mengawal proses kasasi dan perlawanan pidananya di proses banding di Pengadilan Tinggi. "Kami akan meneruskan proses-proses seperti yang sedang berjalan di Polda Kaltim saat ini, yakni melaporkan oknum pihak bank yang diduga melakukan tanda tangan palsu," tutupnya. **(bom)**



## JAS LUCKY, TEMPAT SEWA JAS DI BALIKPAPAN: SOLUSI TAMPIL KEREN TANPA HARUS MAHAL

**BALIKPAPAN** - Anggia Mahardika (35), seorang ibu rumah tangga yang kini bertransformasi menjadi pengusaha unik di Balikpapan. Di garasi rumahnya, ia membuka "Jas Lucky", sebuah usaha penyewaan jas yang menjadi pionir di Kota Beriman.

"Awalnya hanya beberapa koleksi suami, baik yang diperoleh dari kantor maupun yang dibeli seken di Jakarta. Saya kemudian berinisiatif untuk membuka jasa penyewaan jas," ungkap Anggia saat ditemui di kediamannya di Perumahan Puri Ratu Kenca, Sepinggang Baru.

Memulai usaha di tengah pandemi pada 2020, Anggia yang sebelumnya berbisnis toko kaos online, memanfaatkan media sosial, khususnya Instagram @ sewajas\_lucky, untuk mempro-

mosikan Jas Lucky.

Meski di tahun yang penuh tantangan, ia tetap optimistis. "Tahun pandemi justru menjadi waktu yang tepat untuk memperkenalkan Jas Lucky. Banyak orang aktif di media sosial," tambahnya.

Pasca pandemi, dengan banyaknya acara seperti pernikahan, perpisahan sekolah, dan prom night, permintaan penyewaan jas meningkat. "Awalnya hanya 10 koleksi, kini sudah mencapai 300 koleksi," jelas Anggia.

Jas Lucky menawarkan berbagai pilihan, mulai dari jas casual, semi formal, formal, hingga tuxedo dengan harga mulai dari Rp 100 ribu. Selain jas, ada juga vest, kemeja, dan sepatu fantopel dengan rentang harga Rp 20 ribu hingga Rp 50 ribu. Semua item disewakan selama 5 hari.

Anggia menekankan bahwa sewa jas adalah solusi bagi mereka yang ingin tampil elegan tanpa harus mengeluarkan biaya besar. "Membeli setelan jas bisa sangat mahal, dan biasanya hanya digunakan sesekali. Dengan menyewa, masalah ukuran atau model yang tidak pas bisa dihindari," katanya.

Mengenai nama "Jas Lucky", Anggia menjelaskan bahwa selain berarti "Jas Laki-laki", kata "Lucky" memiliki arti beruntung. "Semoga usaha ini membawa keberuntungan bagi keluarga saya," harapnya.

Anggia berharap Jas Lucky tidak hanya menjadi solusi bagi masyarakat Balikpapan untuk tampil keren tanpa harus mengeluarkan biaya besar, tetapi juga sebagai sumber penghidupan bagi keluarganya. (rls)



# PLN BANGUN JARINGAN LISTRIK MENUJU DESA HARAPAN BARU



**KEBUTUHAN AIR DI RUTAN  
TANAH GROGOT DIPASTIKAN AMAN**



## AKSES JALAN DIBUKA, PLN BAKAL BANGUN JARINGAN LISTRIK MENUJU DESA HARAPAN BARU

**PASER** - Perusahaan Listrik Negara (PLN) bersiap membangun jaringan menuju Desa Harapan Baru di Kecamatan Kuaro sehubungan telah dibukanya akses jalan menuju desa tersebut dan Desa Muara Paser di Kecamatan Tanah Grogot.

Manager Unit Layanan Pelanggan (ULP) PLN Tanah Grogot, Nur Khamdan menyampaikan, akses jalan menjadi dukungan utama bagi PLN untuk melaksanakan pembangunan jaringan listrik ke desa.

"Selama kondisi jalan bisa dilewati oleh kendaraan pengangkut material kami, maka kami bisa saja mengerjakan jaringan ke desa-desa," ucap Nur Khamdan, Rabu (23/8/2023).

Disampaikannya, untuk saat ini jalan menuju dua desa tersebut dalam penanganan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser. Pihaknya juga telah memeriksa akses jalan menuju Desa Muara Paser dan Desa Harapan Baru.

Nanti hasil pemeriksaan tersebut akan disampaikan langsung kepada pihak Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Provinsi Kaltim sebagai pelaksana pembangunan jaringan listrik.

"Pembangunan listrik desa nanti akan dikerjakan oleh PLN UP2K Kaltim yang ada di Samarinda, kami hanya melaksanakan pemeriksaan kondisi jalan menuju desa yang selalu kami laporkan," ungkapnya.

Ia juga menyampaikan, kondisi jalan menuju Desa Muara Paser dan Harapan Baru merupakan kawasan rawa. Untuk itu, ULP PLN Tanah Grogot akan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang saat ingin membangun jaringan.

"Kami lihat untuk sisi tepi jalannya masih rawa, jadi nanti bersama dengan Dinas PU akan berkoordinasi terkait titik pemasangan tiang listrik, apakah boleh di bahu jalan atau memang harus di rawa," jelasnya. **(bs)**



Kepala Rutan Kelas 2 B Tanah Grogot, Bayu Muhammad (TB/Media Kaltim)

## KEBUTUHAN AIR DI RUTAN TANAH GROGOT DIPASTIKAN AMAN

**PASER** - Menghadapi musim kemarau panjang, ketersediaan air bersih di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas 2 B Tanah Grogot bagi Warga Binaan Permasyarakatan (WBP) dipastikan tercukupi karena mengandalkan berbagai sumber untuk memenuhi kebutuhan.

"Insyallah kebutuhan air sangat mencukupi selama musim kemarau ini," kata Kepala Rutan Kelas 2 B Tanah Grogot, Bayu Muhammad, Rabu (23/8/2023).

Kendati sudah memasuki bulan ketiga musim kemarau, pihaknya menjamin ketersediaan untuk 715 WBP masih tercukupi. Bahkan kondisi air dipastikan layak konsumsi berdasarkan hasil uji laboratorium dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Paser.]

"Ada kandungan obat-obatan, dan bakteri tapi itu sedikit. Bakteri ini untuk meningkat-

kan kekebalan tubuh," urainya.

Dijelaskan Bayu, Rutan Kelas 2 B Tanah Grogot memiliki tiga sumber air yang dikelola untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Di antaranya sumur bor, sumber air dari Perumda Air Minum Tirta Kandilo dan pihak ketiga.

Sebelumnya diketahui, menghadapi perubahan iklim yang semakin ekstrem dan berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan air bersih, jadi kekhawatiran masyarakat saat ini, tak menutup kemungkinan bagi WBP.

WBP di Rutan Kelas 2 B Tanah Grogot berasal dari 2 Kabupaten, yakni Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Paser sendiri. Sementara itu, kapasitas Rutan Kelas 2 B Tanah Grogot melampaui dari ketersediaan yang seharusnya menampung 160 WBP. **(bs)**